

## **PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM KERANGKA PARADIGMA PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN LOKAL**

MARZUKI \*

### *ABSTRACT*

*The application of Indonesian economic policy of New Orde (ORBA) based on pragmatics model (mix system), that priority to ortodoxy mecanism than heterodoxy, such as reflected on pradigma application (Trickling Down Effect) which basic to principle (Growth With Equity Approach- to priority the new justice growth), actually it has result a number crisis in the nationality life. One of the alternative thinking that considered can support government to solve the experienced problems, have been completed by Hasanuddin of University Team and BKS PTN INTIM (Cooperation of State University of Eastern Indonesian) that well known as concept (Development Pradigma of Local Independent). The Concept of development policy based on the principle (the independent of development subject) on considering that the finding out ( dehomogenization of human resources, nature resources and institutions in development area. This development concept is principlly basic (Equity With Growth Approach- to priority the new justice of growth). The development concept can be said correlated with the development concept (People's Economic) that offered by government, namely development concept which emphasized on development strategy that conformed with real condition of state economic area. In this case, the development of agribusiness sector have to be right real sample as (Leading Sector) the development in Indonesia, now and in the future. By the development strategy that basic to primary sector development of government will be directly or not fulfilled its respossible to make welfare of people's economic (Economic Rights).*

### **PENDAHULUAN**

Strategi pembangunan seharusnya dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup bukan hanya aspek pembangunan ekonomi, tapi juga mencakup diantaranya aspek

perubahan dalam strukur sosial, politik, prilaku maupun struktur kelembagaan kemasyarakatan. Menurut beberapa pengamat, krisis yang melibas berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia selama ini salah satu sebab utamanya karena kekeliruan pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan, yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhannya yang tinggi sebagai « *panglima pembangunan* ».

Menyadari kenyataan pahit yang terjadi, segenap upaya telah dilakukan baik oleh pemerintahan reformasi maupun beberapa kelompok masyarakat yang merasa ber-

---

\* Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Unhas dan Program Pasçasarjana Unhas S2-S3, serta Program Magister Manajemen (MM), Unhas. Master of Economics, DEA. (1993) pada Strasbourg university-Nice university, French dan Ph.D. (1997) pada Nice university, French, dalam bidang analisa ekonomi moneter, keuangan dan perbankan.

tanggung jawab untuk keselamatan dan kejayaan bangsa. Dalam perspektif tersebut, tulisan ini dibuat untuk memberikan beberapa pokok pikiran alternatif tentang paradigma pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil bangsa Indonesia, dan mungkin dapat atau dan harus dilaksanakan. Salah satu paradigma pembangunan yang dimaksud mengacu pada pendekatan teoritik normatif yang dikenal sebagai pendekatan « Paradigma Pembangunan Mandiri, *self reliance* », yang selanjutnya oleh Kelompok Kerja Unhas dijabarkan dalam makna lebih luas yang disebut sebagai « *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* ».

Khusus dalam perspektif ekonomi, paradigma pembangunan serupa ini akan dapat terealisasi hanya jika pemerintah mampu menerapkan dan memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi dimana pelaku ekonominya mengambil keputusan-keputusan ekonomi berdasarkan pola pengambilan keputusan yang desentralistik dan mandiri sesuai kondisi SDA, SDM dan kelembagaannya. Dengan terealisasinya kebijaksanaan serupa itu dapat diartikan bahwa pemerintah langsung atau tidak langsung telah melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (*economic rights*).

#### REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL PARADIGMA PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN LOKAL

Strategi pembangunan pada dasarnya adalah konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan merupakan perencanaan ekplisit (*planning strategic*) yang diterapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, baik dalam artian materiel maupun non materiel yang dikaitkan langsung dengan sumberdaya manusia dan alam yang

dimiliki serta kaitannya dengan dunia internasional. Jadi, strategi pembangunan suatu negara merupakan cerminan dari kemampuan suatu pemerintahan untuk bertindak mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka, jika terjadi krisis di suatu negara dapatlah dikatakan bahwa terdapat suatu krisis dari strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Kasus Indonesia dapat menjadi contoh dari pernyataan tersebut.

Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berbasis politik pembangunan *neoliberal (ortodox capitalism)*. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme *trickling-down effect*. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun menurut banyak pengamat hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut « *konglomerat* ». Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan

fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat pada saat kasus dimana perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak prandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (*blue print*) kebijaksanaan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa datang. Berbagai pemikiran para ahli telah dikemukakan dan disampaikan. Satu diantaranya telah dikaji dan dikembangkan oleh «*Kelompok Kerja Kemandirian Lokal Unhas*» bersama dengan kelompok kerja serupa di beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur (*BKS PTN INTIM*). Dengan berbasis pada premis bahwa «*kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai dan ditingkatkan serta diselenggarakan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya, termasuk kelembagaan yang dimilikinya*».

Jelas tersirat bahwa menurut konsep paradigma pembangunan tersebut, aspek kemanusiaan diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisasi berarti bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (*economic rights*).

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari *Osborne & Gaebler (1993)*, tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* adalah sejalan. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip : «*community oriented*», yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat; kemudian «*community based*», yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan; serta «*community managed*», yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* juga sejalan dengan konsep pembangunan *UNDP (1998)* yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (*human development approach*) dengan empat pilar pembangunannya : pemberdayaan (*empower*); keadilan (*equity*); produktivitas (*productivity*) dan kesinambungan (*sustainable*). Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat moderen dengan tanpa menjadi korban tranpalasi nilai dan kelembagaan asing. Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (*employment-friendly growth*). Akhirnya tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran normatif tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep paradigma pembangunan yang ditawarkan oleh Tim Unhas untuk kondisi Indonesia di masa kini dan masa datang yaitu *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* adalah sejalan dengan pemikiran normatif ilmiah yang telah mengglobal. Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* tersebut, berikut ini akan dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (*economic rights*), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

**PENERAPAN SISTEM EKONOMI  
KERAKYATAN UNTUK MEMENUHI  
HAK KESEJAHTERAAN EKONOMI  
MASYARAKAT DALAM KERANGKA  
PARADIGMA PEMBANGUNAN KE-  
MANDIRIAN LOKAL : PENGEMBANG-  
AN AGRIBISNIS**

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya « *kesejahteraan masyarakat secara merata* », maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (*economic rights*); hak-hak kesejahteraan sosial-budayanya (*social and culture rights*), serta hak

kesejahteraan sipil dan politiknya (*civil and political rights*).

Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan *à la Neoliberal* selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya - seperti telah dijelaskan secara sederhana - beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi. Dalam hubungan itu, *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* ditawarkan oleh Tim Unhas sebagai suatu alternatif strategi pembangunan yang dipercaya dapat mengatasi problem yang dihadapi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai « *blue print* » kebijaksanaan pembangunan dimasa datang.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (*economic rights*) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riil Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada. Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (*people's economy*). Hingga kini definisi tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara

harfiah kami dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa *ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.*

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD '45, khususnya pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorang. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat).

Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin

diantaranya dengan belum direalisasinya UU anti monopoli dan UU persaingan yang sehat secara konsekwen, kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan.

Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondusif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap dibesarkan tidak, dimatikanpun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang berketidak-adilan. Sedangkan dibesarkanpun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.

Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah, atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu berharap banyak dari sektor UKM pertanian !

Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewadewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cenderung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.

Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelekan selama ini justru

dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (*empowerment*) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat dirgiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang.

Kebijaksanaan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan « keadilan baru kemakmuran, *equity with growth approach* » jadi bukan « kemakmuran baru keadilan, *trickling-down effect approach* ». Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian hendaknya dapat menjadi basis utama kebijaksanaan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek *backward* maupun *forward linkage*. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi. Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah

berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisasi dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya.

Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan diasosiasikan dengan « *pengembangan atau pembangunan agro bisnis* ». Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riil usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pascapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-egiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidak pastian pasar, yang

mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu maka untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah: penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan; kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya; serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang fisibel dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor.

Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu « pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep « *kemitraan dalam arti luas* » antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis (*MOU*) dan aplikatif », yang secara sederhana diskhemakan pada halaman berikut ini.

#### PENUTUP DAN KESIMPULAN

Tulisan ringkas ini telah menyampaikan beberapa pokok pikiran yang bersifat normatif maupun aplikatif mengenai aspek-aspek kebijaksanaan ekonomi yang perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah pasca pemilu mendatang, khususnya dalam kerangka pemikiran atau konsep *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*. Konsep ini merupakan hasil aspirasi *Kelompok Kerja Unhas* dalam rangka untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi

dewasa ini maupun untuk kepentingan bagi penyusunan kerangka normatif kebijaksanaan pembangunan dimasa datang, yang bersifat lebih manusiawi (*human development approach*).

Dalam perspektif ekonomi, paradigma pembangunan serupa ini diyakini hanya dapat terealisasi jika pemerintah Indonesia dapat menerapkan dengan bijaksana « *sistem ekonomi kerakyatan* ». Prinsipnya, kebijaksanaan serupa ini berdasarkan atas asas atau prinsip yang mendahulukan « keadilan baru kemakmuran, *equity with growth approach* » jadi bukan « kemakmuran baru keadilan, *trickling-down effect approach* ». Aplikasi realistik bagi kebijaksanaan serupa ini, utamanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor UKM, *agrobisnis*.

Akhirnya, jika kebijaksanaan serupa itu berhasil maka secara langsung atau tidak langsung berarti pemerintah sekaligus telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, seperti kesempatan kerja dan berusaha, kesempatan beriptek serta kesempatan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan mereka, dsb.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Surat Kabar

- Arief, Sritua, 1998. *Pembangunisme dan Ekonomi Indonesia, CPSM (Community for Participatory Social Management)*
- Baswir, Revrison, Hudyanto, Rinto Andriano, M. Yana Adya dan Denny Purwo Sembodo, 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan*, Pustaka Pelajar-IDEA-ELSAM.
- Guillaumont, Patrick et Sylviana, 1994. *Ajustement et Développement, Economica*.

- Mubyarto, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan*, Aditya Media.
- Osborne, David & Ted Gaebler, 1993. *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, PLUME, Penguin Goup.
- Rahardjo, M Dawam (Ed.), 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional : Suatu pendekatan pemerataan, keadilan dan ekonomi kerakyatan*, Intermedia.
- Todd, Emmanuel, 1997. *The French Exception : The Anglo-Saxon economies celebrate liberty, but not equality. At least one nation rejects that model ; Equality.... It is the fundamental doctrine of the Republic*, Newsweek, June 23.
- Tim Universitas Hasanuddin (W.I.M. Poli, Mappadjantji Amien, Tajuddin Parenta, Taslim Arifin, Abdul Madjid Sallatu, Marsuki, Ishak Ngelyaratan, Sadly AD, Fariad Ali, Kamrul Kasim, Willy Voll, dan Laica Marzuki), *Kemandirian Lokal Sebagai Alternatif Paradigma Pembangunan Nasional dan Daerah*. Kertas Karya untuk Seminar Nasional *Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasional*, Universitas Sam Ratulangi-Dewan Hankamnas, 9-10/4/1999.

---

Tulisan merupakan Pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan pada seminar sehari tentang Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai bahan Penyusunan Kerangka GBHN Tahun 2000-2002, Kerjasama MPR-RI dengan Universitas Hasanuddin, 8 Mei 1999.

#### **Karya Tulis**

- Kelompok Kerja Universitas Hasanuddin (Mappadjantji Amien, H.M. Arifin Sallatang, H.M. Askin, Alfian Noor, Syamsu Alam), *Pembangunan Kelautan yang berwawasan Kemandirian Masyarakat Lokal*. Kertas karya untuk persiapan Seminar *Membangun Kemandirian Daerah untuk Mewujudkan Pembangunan Bangsa dalam Konteks Global*, Kampus Universitas Hasanuddin U.P., 11/7/1998.
- Marsuki, *Strategi Pembangunan Ekonomi Berwawasan Kerakyatan*. Kertas karya untuk persiapan Seminar *Membangun Kemandirian Daerah untuk Mewujudkan Pembangunan Bangsa dalam Konteks Global*, Kampus Universitas Hasanuddin U.P., 11/7/1998.
- Sallatu, Abd. Madjid, *Beberapa Catatan tentang Kemandirian Lokal*. Tulisan untuk persiapan Seminar *Pengembangan Solidaritas Kawasan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Ketahanan Nasional*, Kampus Universitas Hasanuddi, U.P, 26/1/1999.

